



Good Governance

Etika Bisnis



Good Governance

Good Governance

Memiliki pengertian pengaturan yang baik, hal ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan etika yang baik dari perusahaan

Konsep *good governance* berkaitan erat dengan konsep pembangunan, dimana keberlanjutan terhadap proses dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pemberdayaan sumber daya alam sesuai dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan komunitas sipil.

Beberapa hal yang dapat menunjang terjadinya *good governance*:

1. Transparansi, pengelolaan aset secara transparan oleh pemerintah.
2. Akuntabilitas, dapat dihitung.
3. Partisipasi, keterlibatan semua lapisan dalam masyarakat
4. Pemberdayaan hukum., kontrol terhadap aktivitas.



Good Governance

Dalam melaksanakan *good governance* ada tiga fokus yang penting dan saling terkait yaitu:

1. Ekonomi

mencakup proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan, kemiskinan dan keadilan hidup.

2. Politik

mempertimbangkan seluruh proses pengambilan keputusan dengan dalam bentuk penyusunan kebijakan

3. Administratif

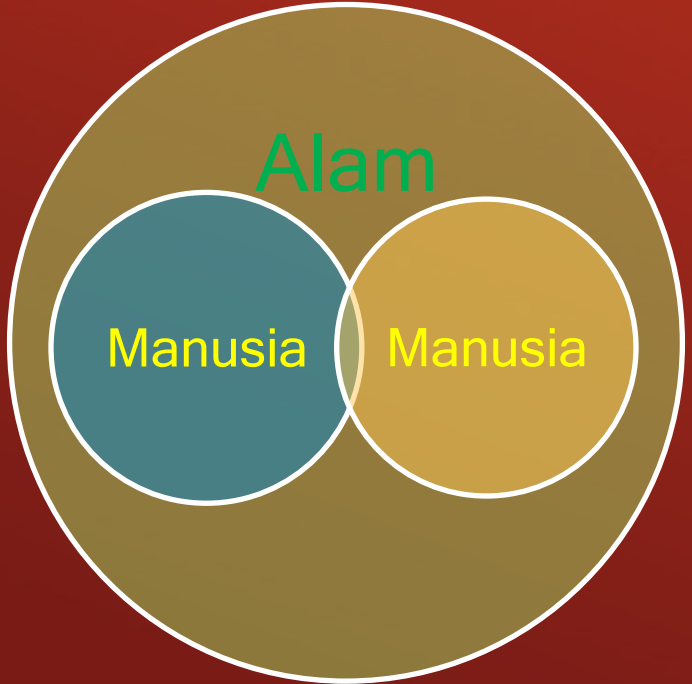
berkaitan dengan implementasi kebijaksanaan di tingkat nasional dan regional.



Good Governance

Konsep *governance* (pengaturan) pada dasarnya sudah berjalan seiring dengan keidupan manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk alam.

Perlunya sebuah pengaturan dalam mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya juga antara manusia dengan penting adanya. Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan sebuah keseimbangan dalam kehidupan





Good Governance

Good governance lebih luas pengertiannya daripada hanya sekedar aturan yang berkaitan dengan administrasi dalam istilah yang konvensional.

Good governance sangat berkaitan erat dengan dasar-dasar yang dilakukan dalam etika. Penerapannya sangat mudah untuk diaplikasikan kedalam berbagai komunitas seperti dibawah ini.





Good Governance

Ada 8 karakteristik dalam *good governance* yang saling mempengaruhi satu sama lain, dimana dalam keterkaitan antara 8 karakteristik ini dapat memberikan keleluasaan bagi kaum minoritas dan juga menekan superioritas dari kalangan penguasa.





Good Governance

1. Partisipasi





Dalam partisipasi pembangunan pemerintah mempunyai peran penting untuk melakukan pengaturan.

Dimana sumber daya alam dan infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah bersama swasta haruslah melibatkan masyarakat.

Partisipasi dalam pemerintah dapat diwujudkan melalui:

1. Partisipasi dari keuntungan yang didapat dari proyek dan kelompok yang terpengaruh serta mempengaruhi aktivitas berjalannya sebuah proyek.
2. Meningkatkan hubungan antara publik dan sektor swasta, khususnya hubungan sosial ekonomi yang bersifat menguntungkan semua pihak. Dimana pemerintah bertindak sebagai fasilitator.
3. Meberdayakan pemerintah lokal dengan kepemilikan proyek daerah yang dikenal dengan otonomi daerah.
4. Menggunakan lembaga swadaya komunitas sebagai kendaraan alat untuk meraih keuntungan melalui sebuah proyek dimana lembaga ini bertindak sebagai pengawas jalannya proyek.



2. Hukum

Bertindak sebagai pengatur yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan sebuah proses yang sedang berlangsung. Legalisasi dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor penting untuk proses keberlangsungan kehidupan bernegara.

3. Transparansi

Keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka pada hal-hal yang memang seharusnya bersifat terbuka. Informasi yang ada sangat bebas dan langsung dapat diakses untuk keseluruhan anggota komunitas.

Transparansi mengacu kepada ketersediaan dari informasi untuk komunitas umum dan penjelasan tentang aturan-aturan pemerintah, regulasi dan keputusan.



4. Responsif

Dalam kaidah *good governance* disini, responsif berarti menyediakan berbagai bentuk layanan kepada setiap komunitas yang tergabung dalam elemen-elemen *stakeholder* dalam memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

Tolak ukur dalam segi pelayanan dapat dilihat melalui proses birokrasi yang tidak berbelit-belit. Tingkat ukuran pengaturan yang baik dapat dilihat melalui kecepatan tanggap lembaga dalam menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses yang panjang.

Mempertahankan sifat responsif dapat dipelihara melalui sistem pengawasan dan pemeriksaan sosial.



5. Berorientasi konsensus

Pengaturan yang baik, pada dasarnya menggabungkan beberapa kepentingan dari beberapa kelompok sosial dalam satu sistem yang bersifat adil dan tidak memihak, walaupun ada keberpihakan adalah pada etika dari hubungan sosial antar komunitas atau pihak yang saling berhubungan sosial.

Berkaitan dengan kondisi komunitas Indonesia, maka orientasi konsensus ini menjadi sangat penting, dalam arti pengaturan harus dapat menjangkau segala kepentingan dan sifat-sifat komunitas yang berbeda satu sama lain.

Adanya perbedaan antar kelompok sosial dan komunitas yang menimbulkan konflik merupakan sebuah usaha bersama untuk membentuk sesuatu yang dapat menampung aspirasi serta kebersamaan dalam memahami aturan yang sama.



6. Adil dan bersifat umum

Kategori adil dan bersifat umum harus dilandaskan pada etika yang dianut secara bersama, hal ini disebabkan karena keberagaman yang ada dalam komunitas di Indonesia. Dimana dalam hal ini tidak bisa dipaksakan kepentingan suatu komunitas tertentu terhadap komunitas yang lain, konsep satu keadilan bagi semua komunitas harus dapat diterapkan secara adil.

Konsep pengaturan yang baik harus didasarkan pada pandangan keadilan yang merata bagi setiap komunitas. Hal ini berguna agar tidak terjadi konflik di kemudian harinya.

Munculnya sifat pengaturan yang baik harus berdasarkan konsep yang umum, dimana pengaturan tidak didasarkan pada satu komunitas tertentu.



7. Efektif dan efisien

Konsep efektifitas dalam *good governance* berarti suatu proses dan kelembagaan yang menghasilkan pertemuan antara kebutuhan di komunitas dengan menghasilkan sebuah output yang berguna dan juga output yang tidak berguna.

Efektifitas dalam hal ini bagaimana proses pengaturan yang baik mampu untuk menekan output yang tidak berguna menjadi seminimal mungkin.

Hal ini biasanya tampak pada pengelolaan sumber daya alam.

Konsep efisiensi dalam konteks *good governance* artinya mencakup keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan sekaligus melindungi lingkungan. Dimana pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan dampak yang positif bagi komunitas yang ada disekitarnya.



8. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sebagai kunci dari *good governance*. Tidak hanya kelembagaan pemerintah tetapi juga sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus dipertanggungjawabkan kepada komunitas dan juga kepada institusi mereka sebagai *stakeholder*.

